

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Dan keindahan lautannya yang memiliki banyak sumber daya perikanan di dalamnya. Dengan begitu banyak timbul rasa iri dari berbagai negara salah satunya adalah negara Vietnam. Oleh karena itu timbul masalah yang sangat marak terjadi di bidang perikanan yaitu kegiatan *illegal fishing*.

Illegal fishing merupakan kegiatan yang sangat merugikan bagi Indonesia. Karena kegiatan *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan tanpa ada izin dari pihak yang resmi dan menangkap ikan di sebuah perairan suatu negara dengan ilegal. *Illegal fishing* ini merupakan masalah yang masih terdengar hingga sekarang dan memberikan dampak negatif bagi negara yang terlibat.

Kegiatan *illegal fishing* terjadi di perairan Indonesia dan dilakukan oleh kapal yang berkewarganegaraan Vietnam. Banyak ditemui kapal dari negara-negara lain yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia namun kapal Vietnam yang paling banyak ditemukan melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Kapal Vietnam tersebut melakukan kegiatan *illegal fishing* untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dimana hasil tangkapan ikan tersebut akan diperjual-belikan oleh Vietnam dengan harga yang sangat tinggi sehingga Vietnam mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil tersebut.

Dengan adanya kasus *illegal fishing* ini maka Indonesia tidak hanya tinggal diam. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah *illegal fishing* yang terjadi tetapi kegiatan *illegal fishing* masih tetap terjadi.

Pada akhirnya Indonesia dan Vietnam memutuskan untuk melakukan kerjasama bilateral. Dimana kerjasama bilateral ini dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu menangani masalah *illegal fishing*. Namun, kerjasama bilateral ini diturunkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU). Indonesia dan Vietnam melakukan kerjasama dalam bentuk MOU sebanyak dua kali.

MOU pertama disepakati pada tanggal 8 Januari 2003 di Jakarta. MOU tersebut berbunyi *Memorandum of Understanding between The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and The Ministry of Fisheries of the Socialist Republic of Vietnam on Fisheries Cooperation*. Namun, maksud dan tujuan dari MOU tersebut tertulis di pasal 2 yaitu, “...*Both Parties shall develop and pursue the following areas of cooperation, inter alia: Prevention, combating and elimination of illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing:...*”. Upaya dari MOU diatas yang telah disepakati oleh Indonesia dan Vietnam yaitu yang pertama berupa *prevention* (pencegahan), dengan cara meningkatkan perlindungan wilayah laut, dengan menambah armada patroli, penggunaan teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS) sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmisi yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Yang kedua *combating* (memberantas), dengan cara memberikan tindakan hukuman kepada pelaku berupa pidana penjara, pidana denda, dan penyitaan. Dan upaya yang ketiga adalah *elimination of illegal* (penghapusan ilegal), cara ini lebih

mengedepankan partisipasi aktif para nelayan, lebih organik dan efektif di samping dari pengawasan oleh pihak aparat di laut. Pemberdayaan nelayan yang di maksud adalah dengan cara memfasilitasi penggunaan kapal dengan GT (*Gross Tonnage*) yang besar dengan teknologi modern, dan kompetensi yang cukup agar kapal nelayan dapat bisa menjangkau laut lepas.

Adapun MOU kedua yang disepakati tepatnya 27 Oktober 2010 di Ha Noi. Bunyi dari MOU tersebut yaitu, *Memorandum of Understanding between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Marine and Fisheries Cooperation* dimana maksud dan tujuan dari isi MOU tersebut terdapat di bait ke 3 “...*The Parties shall seek close cooperation to handle problems relating to IUU Fishing which are brought to the attention of one Party by each other...*”. Upaya MOU yang disebutkan diatas, merupakan kedekatan kerjasama Indonesia dan Vietnam untuk menangani masalah *illegal fishing*. Dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan Vietnam dalam menangani masalah *illegal fishing* pada MOU kedua ini adalah penenggelaman kapal. Penenggelaman kapal yang telah di lakukan sejak tahun 2003 telah berhasil dan di lakukan oleh TNI Angkatan Laut dengan menenggelamkan 4 kapal asing di perairan Indonesia. Sehingga jumlah kapal yang telah di tenggelamkan oleh TNI Angkatan Laut berkisar 38 kapal. Dengan kerjasama Indonesia dengan Vietnam berupa MOU untuk menangani masalah *illegal fishing* berhasil. Kesungguhan Indonesia dan Vietnam dalam kerjasama yang telah di lakukan untuk mencegah masalah *illegal fishing* memberikan dampak positif bagi kedua negara. Dan terbukti dengan keberhasilan kerjasama antara

Indonesia dan Vietnam, kegiatan *illegal fishing* setiap tahunnya mengalami penurunan.

5.2 Saran

Sebagai negara yang berdaulat, tentu saja keamanan serta menjaga potensi yang dimiliki suatu negara adalah keharusan. Tak terkecuali dengan Indonesia yang dikarunia dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah sumber daya laut. Indonesia memiliki potensi perikanan cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain. Tentu saja dengan besarnya potensi dimiliki Indonesia, itu berbanding lurus dengan besar potensi ancaman kejahatan di laut Indonesia.

Dari hasil analisa peneliti dapat diberikan saran untuk menangani kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, dan yang sangat diutamakan di dalam kerjasama bilateral. Saran tersebut berupa:

- Sebelum disepakati suatu perjanjian kerjasama, baiknya antara kedua negara harus menimbang untung dan rugi dari kerjasama yang akan di sepakati.
- Setelah perjanjian disepakati, kedua negara harus melakukan pertemuan atau evaluasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua negara.
- Kedua negara harus melakukan suatu kegiatan bersama seperti pencegahan untuk menangani kasus *illegal fishing*. Dan disana akan terlihat keseriusan serta keadilan dalam kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing negara.